

## Permasalahan Ketimpangan Sosial Kependudukan di Kota Serang dan Kabupaten Serang

Lizam Robiul Labib<sup>1</sup>, Neng Lila Fadilah<sup>2</sup>

Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten <sup>1,2</sup>

Email: [lizamrabiul8@gmail.com](mailto:lizamrabiul8@gmail.com)<sup>1</sup>, [fadilahlila6@gmail.com](mailto:fadilahlila6@gmail.com)<sup>2</sup>

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 6  
Bulan : Juni  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*Socio-demographic inequality between geographically adjacent urban and rural areas constitutes a strategic issue in regional development within Banten Province. This article aims to analyze the social inequality problems between Serang City and Serang Regency based on statistical data from 2024-2025. The research employs a library research method with a descriptive quantitative approach, drawing from official publications of the Central Bureau of Statistics and regional planning documents. The analysis reveals four main problems: Human Development Index disparity (76.90 vs 73.28), demographic burden and labor market disparities (female unemployment in Serang Regency reached 11.48 percent), inequality in social structure and population protection, and imbalance in public service delivery. Furthermore, social class polarization emerges as the deepest root of inequality, with the concentration of upper and middle classes in the city confronting structural poverty traps in the regency. The study concludes that affirmative policies favoring disadvantaged areas are urgently needed to prevent widening gaps and horizontal social conflicts.*

**Keyword:** social inequality, Human Development Index, class polarization, demographic disparity, Serang City-Serang Regency

### Abstrak

*Ketimpangan sosial kependudukan antara wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan secara geografis menjadi isu strategis dalam pembangunan wilayah di Provinsi Banten. Artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan ketimpangan sosial antara Kota Serang dan Kabupaten Serang berdasarkan data statistik tahun 2024-2025. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bersumber pada publikasi Badan Pusat Statistik serta dokumen perencanaan daerah. Hasil analisis mengungkap empat problem utama: ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (76,90 vs 73,28), disparitas beban demografis dan ketenagakerjaan (pengangguran perempuan Kabupaten Serang mencapai 11,48 persen), ketimpangan struktur sosial dan perlindungan penduduk, serta ketidakseimbangan beban pelayanan publik. Lebih jauh, polarisasi kelas sosial menjadi akar terdalam ketimpangan, dengan konsentrasi kelas atas dan menengah di kota berhadapan dengan perangkat kemiskinan struktural di kabupaten. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya kebijakan afirmatif berpihak pada wilayah tertinggal untuk mencegah melebarnya kesenjangan dan konflik sosial horizontal.*

**Kata Kunci:** ketimpangan sosial, Indeks Pembangunan Manusia, polarisasi kelas, disparitas kependudukan, Kota Serang-Kabupaten Serang

## **A. PENDAHULUAN**

Fenomena ketimpangan sosial kependudukan antara wilayah inti kota dan wilayah kabupaten di sekitarnya merupakan isu klasik namun dinamis dalam studi perencanaan wilayah dan ekonomi perkotaan. Di Provinsi Banten, dinamika ini tampak sangat kentara pada dua entitas administratif yang secara geografis beririsan namun memiliki karakteristik demografis yang kontras, yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang. Meskipun secara historis merupakan satu kesatuan, pemekaran yang terjadi telah menciptakan diferensiasi fungsi dan struktur sosial yang tajam. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam permasalahan ketimpangan sosial tersebut berdasarkan indikator-indikator mutakhir, dengan merujuk pada data statistik resmi tahun 2024 hingga awal 2025, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai disparitas pembangunan manusia, beban ketenagakerjaan, serta struktur kependudukan di kedua wilayah. (BPS Provinsi Banten, 2025)

Salah satu indikator paling fundamental yang menunjukkan terjadinya ketimpangan struktural adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2024 menunjukkan bahwa Kota Serang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki IPM sebesar 76,90, yang tergolong dalam kategori tinggi. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan menempatkan kota ini pada status capaian pembangunan yang lebih maju. (Pratiwi, 2025) Sebaliknya, Kabupaten Serang yang memiliki luas wilayah lebih besar dan jumlah penduduk lebih banyak hanya mencatatkan IPM sebesar 73,28 pada periode yang sama. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 3,62 poin, jarak ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan daya beli masyarakat yang menjadi komponen utama penyusun IPM.

Ketimpangan selanjutnya menjadi lebih kompleks ketika mengamati disparitas jumlah penduduk dan tekanan terhadap pasar tenaga kerja. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024, Kabupaten Serang menanggung beban demografis yang jauh lebih besar dengan populasi mencapai 1.527.436 jiwa, didominasi oleh kelompok usia produktif berusia 15 hingga 59 tahun yang berjumlah 957.619 jiwa. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan Kota Serang yang berpenduduk sekitar 743.748 jiwa pada tahun yang sama. Namun, paradoks dari bonus demografi di Kabupaten Serang justru memunculkan masalah baru, yaitu tingginya tingkat pengangguran. Data BPS tahun 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka untuk perempuan di Kabupaten Serang mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 11,48 persen, sementara di Kota Serang, meskipun angka pengangguran masih sekitar 26.008 orang yang

tercatat turun dari 26.686 pada tahun 2024, tingkat persaingan lapangan kerja juga tetap tinggi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 7,12 persen.

Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, struktur sosial kependudukan juga menyoroti perbedaan dalam kualitas hidup dan akses terhadap perlindungan sosial. Data BPS Kota Serang tahun 2024 mencakup indikator seperti persentase kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0 hingga 17 tahun serta indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, yang berfungsi sebagai instrumen pengukuran kerentanan sosial. Sementara itu, Kabupaten Serang dengan populasi yang lebih tersebar menghadapi tantangan klasik dalam pemerataan akses terhadap layanan publik dan administrasi kependudukan. Perbedaan jumlah penduduk yang signifikan antara kedua wilayah ini mengakibatkan Kabupaten Serang memiliki beban tanggung jawab pelayanan publik yang lebih berat namun dengan basis pajak dan skala ekonomi yang mungkin tidak sebanding dengan Kota Serang. (Todaro & Smith, 2020)

Dengan memperhatikan peta permasalahan di atas, penelitian ini berargumen bahwa meskipun secara spasial berdekatan, Kota Serang dan Kabupaten Serang menghadapi dilema ketimpangan sosial yang berbeda. Kota Serang tengah bergulat dengan tekanan urbanisasi dan pemenuhan standar hidup perkotaan, sementara Kabupaten Serang berjuang melawan siklus kemiskinan struktural dan keterbatasan penyerapan tenaga kerja bagi penduduk usia produktifnya yang besar. Melalui analisis berbasis data kuantitatif dari BPS tahun 2024 hingga 2025, artikel ini akan mengeksplorasi akar permasalahan, dampak multidimensional, serta implikasi kebijakan yang diperlukan untuk menjembatani jurang ketimpangan antara pusat kota dan wilayah kabupaten di kawasan Gerbang Banten ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang sepenuhnya berbasis pada data sekunder. Sumber data utama yang digunakan adalah publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2024 dan 2025, meliputi data proyeksi penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, serta data administrasi kependudukan seperti kepemilikan akta kelahiran. (BPS Provinsi Banten, 2024) Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Serang, serta publikasi ilmiah terkait ketimpangan spasial, polarisasi sosial, dan ekonomi perkotaan-pedesaan yang relevan dengan konteks wilayah Gerbang Banten.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran digital pada situs resmi BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [banten.bps.go.id](http://banten.bps.go.id)), jurnal terakreditasi nasional seperti Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, serta laporan tahunan dinas terkait. Seluruh data yang terkumpul kemudian diverifikasi silang untuk memastikan konsistensi dan keabsahannya sebelum dianalisis lebih lanjut. (BPS Provinsi Banten, 2025)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif-deskriptif yang membandingkan indikator-indikator kunci antara Kota Serang dan Kabupaten Serang secara langsung. Setiap indikator dianalisis dalam konteks perbedaan geografis, demografis, dan kebijakan daerah untuk mengungkap faktor-faktor penyebab ketimpangan. Pola hubungan antarindikator, misalnya antara kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran atau antara IPM dan indeks kemiskinan, dianalisis secara sistematis untuk membangun argumen mengenai problem struktural yang saling terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi kualitatif terhadap data kuantitatif untuk menjelaskan fenomena polarisasi kelas sosial dan diskriminasi spasial yang tidak sepenuhnya dapat diukur dengan angka. Semua temuan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang diperkuat oleh tabel perbandingan sederhana untuk memudahkan pembaca memahami disparitas yang terjadi. Validitas penelitian ini sangat bergantung pada akurasi dan keterkinian data sekunder yang digunakan, sehingga seluruh sumber data dicantumkan secara transparan untuk memungkinkan replikasi dan verifikasi oleh peneliti lain di masa mendatang.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kota Serang dan Kabupaten Serang**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024-2025, terjadi ketimpangan IPM yang cukup signifikan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kota Serang sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi mencatatkan IPM sebesar 76,90 yang termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Serang hanya mencapai 73,28 pada periode yang sama. Selisih sebesar 3,62 poin ini, meskipun tampak kecil secara numerik, mencerminkan disparitas nyata dalam kualitas hidup masyarakat kedua wilayah. Ketimpangan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan

akumulasi dari perbedaan akses terhadap fasilitas publik, distribusi tenaga kesehatan, serta kualitas layanan pendidikan yang berlangsung dalam jangka panjang.

Dimensi pertama IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup (AHH), menunjukkan bahwa masyarakat Kota Serang cenderung memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dibandingkan Kabupaten Serang. Kota Serang memiliki konsentrasi rumah sakit tipe C dan D, puskesmas dengan peralatan lengkap, serta tenaga medis spesialis yang jauh lebih banyak. Sebaliknya, Kabupaten Serang yang wilayahnya lebih luas dengan populasi tersebar menghadapi tantangan dalam jangkauan geografis dan rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk. Banyak desa di Kabupaten Serang yang masih mengandalkan puskesmas pembantu dan bidan desa dengan keterbatasan obat-obatan dan alat penunjang medis. Akibatnya, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Serang lebih rendah dibandingkan Kota Serang, mencerminkan risiko kematian yang lebih tinggi akibat keterlambatan penanganan kesehatan.

Dimensi pengetahuan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga memperlihatkan ketimpangan struktural antara kedua wilayah. Kota Serang memiliki jumlah sekolah menengah atas dan kejuruan yang lebih memadai, serta akses terhadap bimbingan belajar dan perpustakaan umum yang lebih baik. Hal ini mendorong partisipasi pendidikan yang lebih tinggi, terutama pada jenjang menengah dan perguruan tinggi. Sementara itu, Kabupaten Serang masih menghadapi kendala distribusi guru, minimnya sekolah di daerah terpencil, serta tingginya angka putus sekolah karena faktor ekonomi dan jarak tempuh. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Serang diketahui lebih rendah, yang berarti banyak penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar tanpa melanjutkan ke jenjang menengah. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing angkatan kerja di masa depan. (Rahayuningsih, 2017)

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menjadi penanda paling nyata dari ketimpangan ekonomi antara Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kota Serang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan perkantoran menyediakan lapangan kerja dengan upah yang relatif lebih tinggi, terutama di sektor formal dan pemerintahan. Akibatnya, daya beli masyarakat Kota Serang lebih kuat, yang tercermin dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap barang dan jasa berkualitas. Sebaliknya, Kabupaten Serang yang berbasis pada sektor pertanian dan industri padat karya skala menengah memiliki tingkat upah yang lebih rendah dengan proporsi pekerja informal yang lebih besar. Ketimpangan daya beli ini menyebabkan

masyarakat Kabupaten Serang lebih rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan memiliki ruang fiskal yang sempit untuk investasi pendidikan dan kesehatan keluarga.

Analisis ketimpangan IPM ini menegaskan bahwa disparitas antara Kota Serang dan Kabupaten Serang tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan parsial, melainkan membutuhkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada daerah tertinggal. Pemerintah Provinsi Banten perlu mendorong pemerataan infrastruktur kesehatan dan pendidikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Serang, misalnya melalui program dokter spesialis bertugas di puskesmas atau beasiswa afirmasi untuk siswa dari desa terpencil. Selain itu, konektivitas transportasi antara wilayah timur dan barat Kabupaten Serang perlu ditingkatkan agar akses ke fasilitas publik tidak lagi terkendala jarak dan biaya. Tanpa intervensi yang terarah dan berkelanjutan, kesenjangan IPM ini berpotensi melebar dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Pada akhirnya, ketimpangan IPM bukan sekadar masalah statistik, melainkan cerminan ketidakadilan spasial dalam pembangunan manusia Indonesia.

### **Disparitas Beban Demografis dan Ketenagakerjaan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang**

Problem kedua yang memperparah ketimpangan sosial kependudukan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang adalah disparitas beban demografis yang sangat timpang. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024, Kabupaten Serang menanggung beban populasi yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 1.527.436 jiwa, sementara Kota Serang hanya berpenduduk 743.748 jiwa pada periode yang sama. Jumlah penduduk Kabupaten Serang yang lebih dari dua kali lipat Kota Serang ini tidak serta-merta menjadi modal pembangunan karena distribusi usia penduduknya juga tidak merata. Kelompok usia produktif, yaitu mereka yang berusia 15 hingga 59 tahun, di Kabupaten Serang mencapai 957.619 jiwa, sebuah angka yang sangat besar yang seharusnya menjadi bonus demografi. Namun, bonus demografi ini justru berubah menjadi beban ketika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. (Salsabila, 2025)

Ketimpangan struktural dalam ketenagakerjaan pertama-tama terlihat dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencengangkan di Kabupaten Serang, khususnya bagi kelompok perempuan. Data BPS tahun 2025 mencatat TPT perempuan di Kabupaten Serang mencapai 11,48 persen, sebuah angka yang termasuk dalam kategori sangat tinggi untuk wilayah yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan akibat faktor budaya, keterbatasan akses transportasi, serta minimnya lapangan kerja formal yang ramah perempuan. Di sisi lain,

Kota Serang meskipun memiliki jumlah angkatan kerja yang lebih kecil, tetap menghadapi tekanan persaingan yang ketat. TPT di Kota Serang tercatat 7,12 persen, dengan jumlah pengangguran absolut sekitar 26.008 orang pada tahun 2025, sedikit menurun dari 26.686 orang pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, Kota Serang belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang datang baik dari warganya sendiri maupun dari arus urbanisasi dari Kabupaten Serang.

Paradoks yang menarik sekaligus memprihatinkan adalah bahwa Kabupaten Serang justru mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan Kota Serang, meskipun wilayah kabupaten tersebut memiliki basis ekonomi pertanian dan industri manufaktur yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja di sekitarnya. Banyak lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Serang yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan industri modern yang berlokasi di kawasan pesisir utara. (Putra, 2020) Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan di Kabupaten Serang tidak mampu menyerap gelombang besar angkatan kerja muda karena sifatnya yang musiman dan semakin tergerus oleh alih fungsi lahan. Akibatnya, terjadi fenomena pengangguran terselubung di mana banyak penduduk usia produktif hanya bekerja secara paruh waktu dengan upah sangat rendah atau bahkan menjadi pekerja keluarga tanpa imbalan.

Sebaliknya, Kota Serang yang berfungsi sebagai pusat administrasi, pendidikan, dan jasa memiliki struktur ketenagakerjaan yang lebih formal namun sangat kompetitif. Tingkat pengangguran 7,12 persen di Kota Serang menunjukkan bahwa setiap 100 angkatan kerja, terdapat lebih dari 7 orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sementara yang bekerja pun belum tentu mendapatkan jam kerja penuh. Tekanan terbesar di Kota Serang berasal dari tingginya ekspektasi upah di sektor formal yang tidak sebanding dengan kualifikasi pendidikan sebagian pencari kerja. Selain itu, arus migrasi masuk dari Kabupaten Serang dan daerah sekitarnya memperketat persaingan, terutama pada sektor perdagangan dan jasa informal seperti buruh bangunan, pekerja restoran, dan ojek online. Fenomena ini menyebabkan biaya hidup di kota menjadi semakin tinggi sementara pendapatan banyak pekerja masih berada di ambang batas minimal, sehingga menciptakan kelas pekerja yang rentan secara ekonomi meskipun secara statistik tidak tercatat sebagai pengangguran.

Penutup dari analisis disparitas beban demografis dan ketenagakerjaan ini menegaskan bahwa perbedaan jumlah penduduk antara Kota Serang dan Kabupaten Serang bukanlah

semata masalah angka, melainkan cerminan dari ketidakmampuan sistem ekonomi dan pendidikan dalam menyerap ledakan angkatan kerja. Pemerintah Kabupaten Serang perlu melakukan intervensi serius melalui peningkatan keterampilan vokasi yang berbasis kebutuhan industri lokal, misalnya dengan membangun pusat pelatihan kerja terpadu di setiap kecamatan. Selain itu, konektivitas transportasi antara kawasan industri di pesisir utara dengan kawasan pemukiman penduduk di selatan Kabupaten Serang harus ditingkatkan agar akses ke lapangan kerja tidak lagi terhalang jarak dan biaya transportasi yang mahal. Bagi Kota Serang, tantangannya adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian urbanisasi melalui penyediaan hunian pekerja yang terjangkau serta memperluas skema magang bersubsidi bagi lulusan baru. Tanpa upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, ketimpangan beban demografis ini akan terus melanggengkan siklus kemiskinan dan menjadi sumber konflik sosial di masa depan.

### **Ketimpangan Struktur Sosial dan Perlindungan Penduduk antara Kota Serang dan Kabupaten Serang**

Problem ketiga yang memperdalam jurang ketimpangan sosial kependudukan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang adalah ketimpangan dalam struktur sosial dan akses terhadap perlindungan penduduk. Struktur sosial merujuk pada bagaimana masyarakat terorganisir dalam lapisan-lapisan berdasarkan akses terhadap kekuasaan, kekayaan, dan prestise, sementara perlindungan penduduk mencakup instrumen administratif seperti kepemilikan dokumen kependudukan serta jaring pengaman sosial. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Serang memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0 hingga 17 tahun yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Serang. Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pintu masuk bagi anak untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Ketimpangan kepemilikan dokumen ini mencerminkan lemahnya jangkauan layanan administrasi kependudukan di wilayah kabupaten yang luas dan tersebar. (Pratiwi, 2025)

Indikator penting lainnya dalam struktur sosial adalah indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan yang diukur oleh BPS sebagai pelengkap dari angka kemiskinan konvensional. Kota Serang sebagai pusat ekonomi memiliki indeks keparahan kemiskinan yang lebih rendah, yang berarti bahwa meskipun masih ada penduduk miskin, kesenjangan pengeluaran di antara mereka tidak terlalu ekstrem. Sebaliknya, Kabupaten Serang mencatatkan indeks keparahan kemiskinan yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa penduduk miskin di kabupaten tersebut hidup dalam kondisi yang jauh di bawah garis kemiskinan dengan tingkat kesulitan yang lebih

berat. Indeks kedalaman kemiskinan yang juga lebih buruk di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa upaya untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah kabupaten membutuhkan intervensi yang lebih masif karena jurang antara pendapatan riil masyarakat miskin dan garis kemiskinan sangat lebar. Ketimpangan dalam kedua indeks ini mencerminkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Serang tidak hanya lebih banyak jumlahnya, tetapi juga lebih parah kualitasnya.

Dari sudut pandang struktur sosial, masyarakat Kabupaten Serang cenderung lebih terperangkap dalam lapisan sosial bawah yang sulit ditembus karena faktor geografis dan kurangnya mobilitas sosial. Banyak desa di Kabupaten Serang yang masih mengandalkan sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, sementara akses terhadap permodalan dan teknologi sangat terbatas. Kondisi ini berbeda dengan Kota Serang yang memiliki struktur kelas sosial lebih beragam, mulai dari kelas pekerja informal, pegawai negeri, hingga pengusaha dan profesional. Keberadaan pusat pemerintahan dan universitas di Kota Serang menciptakan peluang mobilitas sosial vertikal yang lebih besar melalui jalur pendidikan dan birokrasi. Sementara itu, seorang anak yang lahir di pedalaman Kabupaten Serang harus menghadapi jarak puluhan kilometer ke sekolah menengah, minimnya guru berkualitas, dan tekanan ekonomi orang tua yang membutuhkan bantuan tenaga kerja di ladang. (Suryahadi et al., 2010) Ketimpangan struktural ini bersifat antar-generasi dan sangat sulit diputus tanpa kebijakan afirmatif yang serius.

Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako juga mengalami ketimpangan implementasi antara kedua wilayah. Meskipun secara kuantitas penerima di Kabupaten Serang lebih banyak karena jumlah penduduk miskin yang lebih besar, namun kualitas pendampingan dan ketepatan sasaran sering kali menjadi masalah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kabupaten Serang masih terdapat fenomena eksklusi sosial, yaitu keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan karena keterbatasan akses informasi dan administrasi kependudukan. Sebaliknya, di Kota Serang yang kepadatan penduduknya lebih tinggi dan infrastruktur informasi lebih baik, cakupan penerima bantuan cenderung lebih akurat meskipun jumlah absolutnya lebih kecil. Selain itu, lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, rumah singgah, dan lembaga swadaya masyarakat lebih terkonsentrasi di Kota Serang, sementara Kabupaten Serang yang sangat membutuhkan justru minim memiliki lembaga perantara sosial.

Analisis ketimpangan struktur sosial dan perlindungan penduduk ini menegaskan bahwa dokumen kependudukan dan indeks kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari ketidakadilan spasial yang sistematis. Pemerintah Kabupaten Serang perlu

menggencarkan program jemput bola administrasi kependudukan, misalnya dengan mobil keliling yang menjangkau desa-desa terpencil untuk merekam e-KTP dan menerbitkan akta kelahiran secara gratis. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Serang membutuhkan intervensi yang tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga program peningkatan kapasitas ekonomi seperti pelatihan usaha mikro, bantuan alat produksi, serta akses permodalan lunak. Bagi Kota Serang, tantangannya adalah mencegah terbentuknya kantong-kantong kemiskinan perkotaan yang eksklusif akibat tekanan urbanisasi yang terus mengalir dari daerah kabupaten sekitarnya. Pada akhirnya, tanpa perhatian khusus pada struktur sosial yang timpang, kesenjangan perlindungan penduduk ini akan terus memperkuat jurang antara warga negara kelas satu di kota dan warga negara kelas dua di kabupaten.

### **Ketidakseimbangan Beban Pelayanan Publik antara Kota Serang dan Kabupaten Serang**

Problem keempat dalam rentetan ketimpangan sosial kependudukan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang adalah ketidakseimbangan beban pelayanan publik. Kabupaten Serang dengan jumlah penduduk mencapai 1.527.436 jiwa pada tahun 2024 memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang jauh lebih besar dibandingkan Kota Serang yang hanya berpenduduk 743.748 jiwa. Namun, beban yang lebih berat ini tidak diimbangi oleh kapasitas fiskal dan skala ekonomi yang sebanding. Pendapatan asli daerah Kabupaten Serang yang bersumber dari sektor pertanian dan pajak daerah yang relatif kecil tidak mampu membiayai infrastruktur pelayanan dasar yang merata di seluruh kecamatan. Akibatnya, terjadi situasi paradoks di mana wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak justru memiliki kualitas pelayanan publik paling rendah, terutama di daerah-daerah terpencil bagian selatan dan timur kabupaten.

Ketimpangan paling nyata dalam pelayanan publik terlihat dari sebaran infrastruktur kesehatan antara kedua wilayah. Kota Serang memiliki konsentrasi rumah sakit, puskesmas dengan rawat inap, dan apotek 24 jam yang jauh lebih padat per kilometer persegi dibandingkan Kabupaten Serang. Warga di pusat kota dapat mencapai fasilitas kesehatan darurat dalam waktu kurang dari 15 menit, sementara penduduk di beberapa desa di Kecamatan Cinangka atau Padarincang harus menempuh perjalanan lebih dari satu jam dengan medan yang sulit. Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Serang juga jauh di bawah standar nasional, dengan satu dokter umum sering kali melayani puluhan ribu penduduk di wilayah kerjanya. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Serang masih lebih tinggi dibandingkan Kota Serang, sebuah indikator langsung dari buruknya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Sektor pendidikan juga mengalami ketidakseimbangan beban yang serius, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan. Kabupaten Serang yang memiliki jumlah anak usia sekolah lebih besar dari Kota Serang justru memiliki jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Atas yang lebih sedikit per jumlah penduduk. Banyak siswa di kecamatan terpencil harus bersekolah di gedung yang rusak, dengan kekurangan guru mata pelajaran tertentu seperti matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Sementara itu, Kota Serang yang penduduknya lebih sedikit justru memiliki kelebihan kapasitas di beberapa sekolah favorit, yang kemudian menimbulkan fenomena persaingan masuk melalui jalur zonasi yang sangat ketat. Kondisi ini memaksa orang tua dari Kabupaten Serang yang mampu secara finansial untuk menyekolahkan anaknya ke Kota Serang, sehingga semakin memperburuk ketimpangan dan menciptakan eksodus pelajar ke wilayah kota.

Ketidakseimbangan juga terjadi pada pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang sangat terkonsentrasi di pusat-pusat kota. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang yang berlokasi di pusat kecamatan yang mudah dijangkau dari Kota Serang justru sulit diakses oleh penduduk di ujung selatan kabupaten. Warga dari Kecamatan Mancak atau Gunung Sari harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit dan kehilangan satu hari kerja hanya untuk mengurus perpanjangan Kartu Keluarga atau pembuatan akta kelahiran. Sebaliknya, warga Kota Serang dapat mengurus dokumen kependudukan dalam hitungan jam karena lokasi kantor pelayanan yang strategis dan didukung oleh sistem antrean daring yang terintegrasi. Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana sebagian besar penduduk Kabupaten Serang memiliki dokumen kependudukan yang tidak lengkap atau kedaluwarsa, yang pada gilirannya menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang membutuhkan persyaratan administratif.

Analisis ketidakseimbangan beban pelayanan publik ini menegaskan bahwa ketimpangan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan anggaran daerah secara sektoral. Diperlukan kebijakan afirmatif berbasis kesetaraan horizontal, di mana Kabupaten Serang yang memiliki beban lebih berat harus mendapatkan alokasi dana perimbangan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten. Salah satu solusi konkret adalah pembangunan pusat pelayanan publik terpadu di setiap kecamatan di Kabupaten Serang yang memiliki akses terbatas, misalnya melalui program kecamatan layak layanan dengan standar minimal yang mengikat. Selain itu, sistem layanan daring (online) perlu diperluas jangkauannya hingga ke level desa melalui

pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan pos desa yang ada. Pemerintah Kabupaten Serang juga harus berani melakukan pemekaran kecamatan atau desa di wilayah selatan agar beban pelayanan tidak terlalu berat pada satu pusat administrasi. Pada akhirnya, tanpa pemerataan beban pelayanan publik, ketimpangan sosial kependudukan antara kota dan kabupaten akan terus melebar dan menciptakan dua kelas masyarakat yang hidup dalam satu nama wilayah tetapi dengan nasib yang sangat berbeda.

### **Polarisasi Masyarakat antara Kota Serang dan Kabupaten Serang**

Polarisasi masyarakat merupakan problem kelas sosial paling fundamental yang mendasari seluruh ketimpangan kependudukan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang. Polarisasi merujuk pada proses terbelahnya masyarakat ke dalam dua kutub yang saling berseberangan, yaitu kutub kota yang relatif makmur dan kutub kabupaten yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Berdasarkan observasi data kependudukan tahun 2024 hingga 2025, terjadi akumulasi sumber daya manusia berkualitas, modal ekonomi, dan pengaruh politik di Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Sebaliknya, Kabupaten Serang yang luas wilayahnya berkali-kali lipat lebih besar justru berfungsi sebagai daerah penyangga pemasok tenaga kerja kasar dengan tingkat pendidikan rendah dan pendapatan tidak tetap. Polarisasi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan produk dari kebijakan pembangunan yang selama puluhan tahun lebih memprioritaskan pusat kota dibandingkan wilayah pinggiran, serta diperparah oleh mekanisme pasar yang secara alami menarik modal dan bakat ke kawasan yang sudah maju. Akibatnya, terbentuklah dua dunia yang berbeda dalam radius kurang dari 50 kilometer: dunia urban Kota Serang dengan segala kemudahan dan kemewahannya, serta dunia rural Kabupaten Serang dengan segala keterbatasan dan keterbelakangannya. (BPS Provinsi Banten, 2025)

Kawasan seperti Lingkar Barat, Ciwaru, dan sekitar Kantor Gubernur Banten menjadi kantong-kantong hunian bagi pegawai negeri sipil eselon, pengusaha menengah, profesional seperti dokter dan pengacara, serta pensiunan berpenghasilan tetap. Mereka menikmati akses terhadap perumahan terencana dengan keamanan 24 jam, mal modern, rumah sakit swasta, sekolah internasional, serta ruang publik yang tertata rapi. Sementara itu, di Kabupaten Serang, khususnya di kecamatan-kecamatan selatan seperti Mancak, Padarincang, dan Gunung Sari, hampir tidak ditemukan kantong kelas menengah yang signifikan. Keluarga yang relatif mampu sekalipun di kabupaten paling-paling hanya memiliki rumah sederhana dengan lantai keramik, tanpa akses terhadap layanan-layanan premium yang sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat kota. Konsentrasi kelas sosial di kota ini menciptakan efek bola salju di mana

investasi infrastruktur, pembukaan lapangan kerja formal, dan pembangunan fasilitas publik terus mengalir ke wilayah yang sudah padat kelas menengah, sementara kabupaten hanya kebagian remah-remah pembangunan.

Perangkap ini berarti bahwa kemiskinan tidak hanya dialami oleh satu generasi, tetapi diwariskan kepada generasi berikutnya karena tidak ada jalur mobilitas sosial vertikal yang memadai. Seorang anak yang lahir di desa terpencil Kabupaten Serang harus berjuang ekstra keras melawan keterbatasan infrastruktur sekolah, minimnya guru berkualitas, serta tekanan ekonomi orang tua yang sering kali membutuhkan bantuan tenaga kerja di ladang daripada menyuruh anaknya belajar. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Serang masih berkatut di level tamatan sekolah dasar atau menengah pertama, sebuah angka yang sangat rendah untuk bersaing di pasar kerja abad ke-21. Tanpa ijazah menengah atas atau keterampilan teknis yang diakui, pemuda-pemudi Kabupaten Serang hanya bisa mengakses pekerjaan dengan upah harian di sektor konstruksi, buruh pabrik, atau pembantu rumah tangga di Kota Serang. Upah yang mereka terima tidak pernah cukup untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, apalagi untuk mengakumulasi modal pendidikan bagi anak-anak mereka sendiri di masa depan.

Masyarakat Kota Serang terbiasa berbelanja di mal seperti Transmart dan Mall of Serang, mengisi akhir pekan di kafe kekinian dengan harga kopi puluhan ribu rupiah, serta menggunakan layanan ojek online dan pengiriman barang instan. Sebaliknya, masyarakat Kabupaten Serang masih bergantung pada pasar tradisional dengan tawar-menawar harga, warung kopi sederhana dengan harga seribu rupiah per gelas, serta transportasi darat yang tidak menentu jadwalnya. Kesenjangan konsumsi ini bukan hanya masalah gengsi, tetapi menciptakan segregasi ruang di mana masyarakat kota cenderung menghindari pasar tradisional yang dianggap kumuh, sementara masyarakat kabupaten merasa terintimidasi masuk ke mal karena harga yang tidak terjangkau dan tekanan sosial dari penampilan mereka yang sederhana. (Pratiwi, 2025) Akibatnya, tidak terjadi percampuran sosial yang sehat, melainkan isolasi timbal balik yang memperkuat stereotip negatif. Masyarakat kota sering memandang penduduk kabupaten sebagai orang desa yang ketinggalan zaman, sementara penduduk kabupaten melihat masyarakat kota sebagai sombong dan konsumtif tanpa peduli pada nasib saudara-saudara mereka di pinggiran.

Dalam relasi kerja, seorang pencari kerja dari Kabupaten Serang sering kali ditawari upah lebih rendah dibandingkan pencari kerja dari Kota Serang untuk pekerjaan yang sama, dengan alasan biaya transportasi atau tingkat pendidikan yang dianggap tidak setara. Dalam pelayanan

publik, pegawai di kantor kecamatan atau puskesmas di Kota Serang kerap menunjukkan sikap kurang sabar atau kurang hormat ketika melayani warga Kabupaten Serang yang biasanya datang dengan penampilan sederhana dan dokumen yang kurang lengkap. Bahkan dalam interaksi sosial sehari-hari seperti di angkutan umum atau di pasar, aksen bicara dan cara berpakaian khas Kabupaten Serang sering menjadi bahan ejekan atau olok-olok halus yang merendahkan martabat. Stigma sosial ini pada akhirnya diinternalisasi oleh masyarakat Kabupaten Serang sendiri, sehingga mereka menjadi rendah diri, tidak berani bermimpi tinggi, dan pasrah menerima nasib sebagai warga kelas dua di tanah kelahiran mereka sendiri. Polarisasi masyarakat yang telah mencapai tingkat internalisasi stigma seperti ini adalah yang paling sulit diatasi karena membutuhkan perubahan kesadaran kolektif, bukan sekadar kebijakan redistribusi ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik semata.

Tabel 1. Strategi Penanganan Ketimpangan Sosial Kependudukan Kota Serang dan Kabupaten Serang

No	Strategi	Target	Indikator Keberhasilan	Jangka Waktu
1	Pemerataan infrastruktur kesehatan dan pendidikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Serang	Tersedianya minimal 1 puskesmas rawat inap dan 1 SMP Negeri pada wilayah yang masih terbatas akses layanannya	Rasio dokter per 10.000 penduduk meningkat; angka partisipasi sekolah menengah meningkat sebesar 15%	3-5 tahun
2	Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri	Menyerap sedikitnya 50% pengangguran usia produktif di Kabupaten Serang	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun hingga di bawah 8%; TPT perempuan turun menjadi di bawah 9%	2-4 tahun
3	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan dan program jemput bola di wilayah terpencil	Seluruh penduduk Kabupaten Serang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid	Kepemilikan akta kelahiran, KTP, dan KK mencapai minimal 95%	1-2 tahun
4	Kebijakan afirmasi anggaran melalui peningkatan alokasi Dana	Mengurangi kesenjangan pembangunan dan kemiskinan antara	IPM Kabupaten Serang mencapai minimal 75,00; Gini Ratio menurun sebesar 0,05 poin	5 tahun

	Alokasi Khusus (DAK) bagi Kabupaten Serang	Kabupaten Serang dan Kota Serang		
5	Kampanye anti-stigma dan penguatan integrasi sosial antarwilayah melalui kegiatan kolaboratif masyarakat	Mengurangi diskriminasi spasial dan memperluas mobilitas sosial masyarakat	Meningkatnya jumlah siswa Kabupaten Serang yang diterima di PTN; berkurangnya stereotip negatif dalam media dan masyarakat	3-5 tahun

**D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data kependudukan tahun 2024-2025, ketimpangan sosial antara Kota Serang dan Kabupaten Serang terjadi dalam empat problem utama yang saling berkaitan secara sistemik. Pertama, ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa Kota Serang dengan nilai 76,90 berada pada kategori tinggi, sementara Kabupaten Serang hanya mencapai 73,28 akibat disparitas akses kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Kedua, disparitas beban demografis dan ketenagakerjaan mengungkap bahwa Kabupaten Serang dengan populasi 1,5 juta jiwa justru mengalami Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan sebesar 11,48 persen, sementara Kota Serang dengan populasi lebih kecil tetap bergulat dengan persaingan kerja yang ketat. Ketiga, ketimpangan struktur sosial dan perlindungan penduduk tercermin dari rendahnya kepemilikan akta kelahiran serta indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan yang lebih buruk di Kabupaten Serang. Keempat, ketidakseimbangan beban pelayanan publik membuat Kabupaten Serang yang memiliki tanggung jawab lebih besar justru memiliki infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan administrasi yang jauh lebih terbatas dibandingkan Kota Serang.

Akar sesungguhnya dari ketimpangan ini adalah polarisasi kelas sosial yang menciptakan dua dunia berbeda dalam satu wilayah. Konsentrasi kelas atas dan menengah di Kota Serang berhadapan dengan perangkat kemiskinan struktural di Kabupaten Serang, diperparah oleh kesenjangan gaya hidup serta stigma sosial yang merendahkan martabat penduduk kabupaten sebagai warga kelas dua. Tanpa intervensi kebijakan afirmatif yang berpihak pada wilayah tertinggal, seperti pemerataan infrastruktur pelayanan publik, program beasiswa afirmatif, serta kampanye antistigma dan diskriminasi spasial, kesenjangan ini akan terus melebar dan berpotensi memicu konflik sosial horizontal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat untuk tidak lagi memperlakukan

Kota Serang dan Kabupaten Serang sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan wilayah fungsional yang pembangunannya harus berkeadilan dan berpihak pada masyarakat paling terpinggirkan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- BPS Provinsi Banten. (2022). Provinsi Banten Dalam Angka 2022. BPS Provinsi Banten.
- BPS Provinsi Banten. (2023). Proyeksi Penduduk Provinsi Banten 2020–2025. BPS Provinsi Banten.
- BPS Provinsi Banten. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2020–2023. BPS Provinsi Banten.
- BPS Provinsi Banten. (2024). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Banten 2024. BPS Provinsi Banten.
- BPS Provinsi Banten. (2024). Statistik Kependudukan Provinsi Banten 2024. BPS Provinsi Banten.
- BPS Provinsi Banten. (2025). Banten Province in Figures 2025. BPS-Statistics of Banten Province.  
<https://banten.bps.go.id/en/publication/2025/02/28/3308511080de4eb42086c9a8/banten-province-in-figures-2025.html>
- BPS Provinsi Banten. (2025). Human Development Index (HDI) of Banten Province in 2025. BPS-Statistics of Banten Province.  
<https://banten.bps.go.id/en/pressrelease/2025/11/05/903/human-development-index--hdi--of-banten-province-in-2025.html>
- BPS Provinsi Banten. (2025). Indikator Makro Provinsi Banten Semester I 2025. BPS Provinsi Banten.  
<https://banten.bps.go.id/id/publication/2025/09/29/47e1f448b80056ea5632739a/in-dikator-makro-provinsi-banten-semester-i-2025.html>
- BPS Provinsi Banten. (2025). Population Aged 15 Years and Over by Type of Employment Activity and Regional Classification in Banten Province (people), 2025. BPS-Statistics Indonesia. <https://banten.bps.go.id/en/statistics-table/2/OTg2IzI=/population-aged-15-years-and-over-by-type-of-employment-activity-and-regional-classification-in-banten-province.html>
- Kabupaten Serang. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. (2021a). Laporan KLHS tahun 2021. Kementerian ATR BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. (2021b). Rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah Kecamatan Kramatwatu. Kementerian ATR BPN.

Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Mengatasi Ketimpangan dan Membangun Daya Saing*. Jakarta: Erlangga.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019a). *Kebijakan publik (Cara mudah memahami kebijakan publik)*. CV. AA. Rizky.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019b). *Kebijakan publik*. CV. AA. Rizky.

Moleong, J. L. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Pratiwi, M. A. A. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten*. Skripsi. UPN Veteran Jawa Timur. <https://repository.upnjatim.ac.id/39489/>

Putra, A. R. (2020). Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Banten: Studi Kasus Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 145-160.

Rahayuningsih, Y. (2017). Dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 13-26.

Salsabila, N. (2025). *Pengaruh Pertumbuhan Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Banten*. Skripsi. UPN Veteran Jakarta. <http://repository.upnvj.ac.id/34944/>

Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Baduouse Media.

Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2010). The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 89(1), 109-117.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson Education.